

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMEGANG SAHAM KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Suryani Alawiyah (2310622061), Bambang Waluyo, Irwan Triadi

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pemegang saham dan korporasi dalam hukum positif di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup. Fokus penelitian adalah pada tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada individu dan entitas, dalam hal ini pemegang saham dan korporasi atas tindakan yang melanggar hukum / tindak pidana. Analisis ini dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, mencakup ketentuan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana pemegang saham korporasi terutama Undang Undang R.I. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Perma No. 13 Tahun 2016 serta Undang Undang R.I. No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji doktrin *piercing the corporate veil* dalam penegakan hukum terhadap pemegang saham, terutama terkait kasus terkait lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam konsep yang dapat melindungi keadilan dan mencegah penyalahgunaan dalam struktur korporasi, dengan memastikan individu di balik korporasi dapat dimintai tanggung jawab jika bertindak di luar batas hukum. Analisis ini menyoroti situasi di mana tindakan korporasi berdampak pada lingkungan, dan di mana pemegang saham mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengidentifikasi tanggung jawab pidana terhadap individu /pemegang saham di balik korporasi dalam kasus kerusakan lingkungan, sebagaimana kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst dan kasus kebakaran hutan dan lahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw sebagai contoh terjadinya karhutla berulang di area konsensi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan doktrin *piercing the corporate veil* telah diterapkan secara potensial dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst kemudian potensi pemegang saham dipidana atas tindak pidana lingkungan hidup sebenarnya dapat bersandarkan pada Perma No. 13 Tahun 2016 dalam kategori setiap orang. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum lingkungan di Indonesia dan memperkuat prinsip tanggung jawab korporasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana; pemegang saham; lingkungan hidup.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATE SHAREHOLDERS IN ENVIRONMENTAL CRIMES

Suryani Alawiyah (2310622061), Bambang Waluyo, Irwan Triadi

This research aims to analyze the criminal liability of shareholders and corporations under positive law in Indonesia, particularly in the context of environmental crimes. The focus of the study is on the legal responsibilities that can be imposed on individuals and entities—namely shareholders and corporations—for actions that violate the law or constitute crimes. This analysis is conducted based on the existing legal framework in Indonesia, including statutory provisions governing the criminal liability of corporate shareholders, especially Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UU PPLH), Supreme Court Regulation No. 13 of 2016, and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Furthermore, this research examines the doctrine of piercing the corporate veil in the enforcement of laws against shareholders, particularly concerning environmental cases. The goal is to gain a deeper understanding of concepts that can protect justice and prevent abuses within corporate structures by ensuring that individuals behind corporations can be held accountable if they act beyond legal boundaries. The analysis highlights situations in which corporate actions impact the environment, and where shareholders may be liable for violations of environmental law.

This study employs a normative approach by identifying criminal liability towards individuals/shareholders behind corporations in cases of environmental damage, as seen in the Central Jakarta District Court Decision No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst and the forest and land fire case in the Pelalawan District Court Decision No. 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, which serves as examples of recurring land and forest fires in company concession areas. The findings indicate that the doctrine of piercing the corporate veil has been potentially applied in the Central Jakarta District Court Decision No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, suggesting that the potential for shareholders to be criminally charged for environmental crimes may be based on Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 under the category of "every person." This research is expected to contribute to the development of environmental law in Indonesia and strengthen the principle of sustainable corporate responsibility.

Keywords: *criminal liability; shareholders; environment.*